



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-11543 /PB/2017

22 Desember 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Sertifikat *Surveillance* Audit Sistem Manajemen Mutu  
ISO 9001:2008 pada 17 KPPN Tahun 2017.

Yth. (terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan *surveillance* audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 Tahun 2017 pada 17 KPPN yang telah selesai, dengan ini disampaikan:

1. Pihak *British Standard Institution* (PT. BSI Grup Indonesia) sebagai *provider* Badan Sertifikasi telah menyampaikan laporan tentang penyelesaian pelaksanaan *surveillance* audit pada 17 KPPN dimana ke-17 KPPN tersebut telah **lulus** *surveillance* audit dan direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat *surveillance* audit SMM ISO 9001:2008.
2. Selanjutnya, PT. BSI Grup Indonesia telah menyampaikan *hardcopy* sertifikat *surveillance* audit SMM ISO 9001:2008 pada 17 KPPN dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nomor Register Sertifikat	No.	Lokasi	Nomor Register Sertifikat
1.	KPPN Banda Aceh	FS 684124	11.	KPPN Pontianak	FS 684117
2.	KPPN Palembang	FS 684130	12.	KPPN Balikpapan	FS 684115
3.	KPPN Batam	FS 684114	13.	KPPN Denpasar	FS 684126
4.	KPPN Jakarta I	FS 684072	14.	KPPN Mataram	FS 684121
5.	KPPN Serang	FS 684131	15.	KPPN Manado	FS 684119
6.	KPPN Semarang I	FS 684116	16.	KPPN Makassar I	FS 684016
7.	KPPN Surabaya I	FS 684132	17.	KPPN Ambon	FS 684133
8.	KPPN Yogyakarta	FS 684077			
9.	KPPN Bandung I	FS 684120			
10.	KPPN Banjarmasin	FS 684118			

3. Berdasarkan hal tersebut, terlampir sertifikat *surveillance* dimaksud untuk dapat segera disampaikan kepada masing-masing KPPN di dalam wilayah kerja Saudara.
4. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan konsistensi pelaksanaan implementasi SMM ISO 9001:2008 pada KPPN.
5. Dengan mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, berarti tata kelola/proses bisnis dan sistem manajemen mutu yang ada di KPPN telah diakui dan sesuai dengan standar sistem manajemen mutu internasional.
6. Keberhasilan penerapan SMM ISO 9001:2008 pada KPPN sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh pegawai KPPN dan dukungan penuh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka menjaga kualitas layanan dan berjalannya sistem pengendalian internal yang optimal.

7. Dengan konsistensi implementasi SMM ISO 9001:2008, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN berkewajiban untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/publik melalui perubahan pola pikir (*mindset*), disiplin dan budaya kerja (*culture-set*), penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya yang memadai termasuk manajemen kinerja, sehingga kualitas pelayanan publik selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Demikian, untuk dapat ditindaklanjuti.



Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Marwanto Harjowiryo 4  
NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Kepala KPPN Banda Aceh.
2. Kepala KPPN Palembang.
3. Kepala KPPN Batam.
4. Kepala KPPN Jakarta I.
5. Kepala KPPN Serang.
6. Kepala KPPN Bandung I.
7. Kepala KPPN Semarang I.
8. Kepala KPPN Yogyakarta.
9. Kepala KPPN Surabaya I.
10. Kepala KPPN Pontianak.
11. Kepala KPPN Banjarmasin.
12. Kepala KPPN Balikpapan.
13. Kepala KPPN Denpasar.
14. Kepala KPPN Mataram.
15. Kepala KPPN Makassar I.
16. Kepala KPPN Manado.
17. Kepala KPPN Ambon.



Lampiran Surat  
Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor S- 11543 /PB/2017  
Tanggal 22 Desember 2017

1. Kepala Kanwil DJPb Prov. Aceh.
2. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan.
3. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau.
4. Kepala Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta.
5. Kepala Kanwil DJPb Prov. Banten.
6. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat.
7. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah.
8. Kepala Kanwil DJPb Prov. D.I Yogyakarta.
9. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur.
10. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat.
11. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan.
12. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur.
13. Kepala Kanwil DJPb Prov. Bali.
14. Kepala Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat.
15. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan.
16. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara.
17. Kepala Kanwil DJPb Prov. Maluku.